

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah wilayah yang ditempati oleh sekumpulan masyarakat yang berada di pemukiman dimana tempat tersebut terdapat pembagian daerah administratif dibawah kecamatan. Desa termasuk bentuk pemerintahan terkecil di wilayah kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, didesa terdapat beberapa potensi yaitu potensi fisik dan potensi non fisik, dimana potensi fisik tersebut meliputi cuaca, iklim, tanah, air, flora dan fauna sedangkan potensi non fisik adalah masyarakat desa. Jika potensi yang ada di desa dikelola dengan baik maka desa akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dan memiliki fungsi bagi daerah lain maupun bagi kota.

Desa berfungsi sebagai tempat pemasok atau penyedia kebutuhan sehari-hari bagi kota dan sumber tenaga kerja bagi daerah perkotaan jika desa tersebut terus berkembang seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Di desa terdapat seorang pemimpin yang berfungsi sebagai seseorang yang memimpin desa dalam mengelola potensi yang ada didesa, alat pemantau maupun pengendali setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa, pelaksana pembangunan desa dan sebagai pemberdayaan masyarakat. Seorang pemimpin yang berada di desa biasanya disebut dengan kepala desa.

Menurut Purba (2015:6) Kepala desa atau pemimpin desa adalah tokoh dalam masyarakat yang diberi kewenangan tertentu dalam mengatur jalannya kegiatan masyarakat yang berupa pergaulan dan interaksi antar masyarakat. Sedangkan menurut Widagdo (2006:55) Kepala desa adalah tokoh masyarakat yang menjadi contoh satu-satunya faktor untuk melakukan dorongan atau motivasi yang berkesinambungan. Peran kepala desa memang begitu penting bagi masyarakat, kepala desa harus aktif mendatangi atau melihat keadaan masyarakatnya,

menghadiri pertemuan dan terbuka kepada masyarakat dalam menjelaskan suatu program yang akan dilaksanakan di desa.

Kepala desa beserta bawahannya sebagai seseorang yang sangat penting bagi masyarakat, peran serta tanggung jawabnya akan menunjukkan baik buruk maju mundurnya suatu desa maka dari itu masyarakat memerlukan sosok pemerintahan desa yang mampu membina kesejahteraan masyarakatnya. Kepala desa beserta aparat desa memiliki tugas serta tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan, menyelenggarakan aktifitas pemerintahan, dan menjamin ketenteraman masyarakatnya. Kepala desa harus menjalankan tanggung jawabnya dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Bidang administrasi yang diserahkan kepada aparat desa memiliki kedudukan yang tinggi dan penting karena kedudukannya sebagai pemerintahan yang berada di posisi bawah yang bertugas mengetahui segala kondisi, potensi serta permasalahan yang ada di wilayahnya. Maka keterangan dan informasi dari pemerintah desa sangat diperlukan oleh pemerintah kecamatan sebagai pengambilan kebijakan daerah maupun nasional untuk pembangunan secara menyeluruh.

Peran dari seorang pemimpin di masyarakat begitu penting, seorang pemimpin harus mampu membina dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan kegiatan yang dilaksanakan di desa. Masyarakat akan lebih mempunyai keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di desa apabila masyarakat melihat pemimpinnya berhasil dalam melakukan suatu kegiatan dan mendapat apresiasi lebih dari pemimpin yang lebih tinggi kedudukannya. Maka dari itu peran dari seorang pemimpin sangat lah dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

Jadi, kepala desa disini dapat disimpulkan sebagai seseorang yang memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan dan mengatur pergaulan masyarakat sesuai dengan hukum adat istiadat maupun hukum dari negara. Kepala

desa juga berpengaruh besar dalam memberikan motivasi kepada masyarakat dalam suatu kegiatan untuk membangun desa agar lebih maju dan berkembang, akan tetapi sebelum melakukan suatu kegiatan dalam lingkup pembangunan desa, kepala desa harus mengajak serta memberikan sosialisasi untuk mengajak masyarakat turun langsung dalam pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa agar tidak ada kesalahpahaman masyarakat.

Menurut Haryadi (2018:5) Pembangunan desa adalah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa yang menyangkut semua kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintahan desa harus lebih mampu melibatkan serta menggerakkan masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan yang dilaksanakan di desa termasuk pembangunan dan berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan desa tergantung pada seberapa besar pemerintah desa mewujudkan berdaya guna dan hasil guna. Selanjutnya dapat disadari bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa memerlukan keikutsertaan masyarakat dalam hal proses penyusunan rencana pembangunan yang akan dilakukan, tindakan lanjut dari pembangunan tersebut, hal tersebut menjadi salah satu kunci utama berhasil atau tidaknya sebuah pembangunan.

Penyedia dan penerima pelayanan baik pemerintahan desa atau organisasi lainnya menjadi aktor utama yang sangat penting dalam pembangunan yang meliputi pengambilan keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan dan yang terakhir yaitu tingkat kesejahteraan sosial. Maka dalam hal ini pemerintahan desa menjadi parlemen desa yang sangat penting bahwa dengan adanya kepala desa berarti terdapat pemisahan antara tugas legislatif dan tugas eksekutif. Selanjutnya dengan terpilihnya kepala desa dan keberadaan kepala desa membuat masyarakat untuk aktif menyuarakan haknya, menuangkan segala aspirasi, inspirasi dan kepentingannya kepada pemerintah desa dimana masyarakat berharap kepentingannya tersebut diperjuangkan oleh wakil rakyat. Keberadaan wakil rakyat inilah yang menjadi elemen positif untuk mewujudkan negara yang demokrasi.

Sedangkan menurut Nafidah dkk (2015:225) Pembangunan masyarakat desa dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan masyarakat dimana mereka menganalisis kebutuhan serta permasalahan yang sedang terjadi di desa secara bersama-sama. Pembangunan di desa ditujukan pada pembangunan yang dilakukan di desa dimana alam dan manusia sebagai sumber daya yang dimanfaatkan desa untuk meningkatkan pembangunan sektor perdagangan, pertanian dan industri antar desa ataupun antar kota yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang merata. Menurut Dhani (2017:142) Pembangunan di desa merupakan model pembangunan yang bersifat partisipatif dimana pembangunan tersebut dilakukan secara gotong royong dalam melaksanakan pembangunan sedangkan saat menyusun rencana pengelolaan pembangunan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat bersama dengan masyarakat dimana kegiatan tersebut sudah ada sejak jaman dahulu dan dilakukan secara turun temurun di Indonesia.

Pembangunan yang dilakukan di desa diharapkan dapat memajukan serta menunjang berkembangnya sebuah desa. Adapun peran dari kepala desa sangatlah penting dimana peran dari kepala desa itu sendiri menentukan pembangunan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kinerja para pekerja pembangunan, kualitas dari pembangunan itu sendiri dan menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pembangunan. Hal ini dapat ditentukan atau dapat dilihat dari seberapa besar pengaruh seorang kepala desa dalam berkecimpung bersama masyarakat untuk melakukan perubahan desa lewat pembangunan untuk memajukan suatu desa.

Pembangunan yang dilakukan di desa tentunya harus melihat potensi yang ada di desa tersebut. Pembangunan yang ada di desa berkaitan dengan pembangunan pada sektor infrastruktur, pertanian dan perdagangan dengan melihat SDA maupun SDM. Sebagian besar desa yang memiliki daerah jauh dari pantai biasanya melakukan pembangunan pada sektor pertanian dengan melihat keadaan tanah untuk menunjang tingkat kesuburan tanah dan kualitas hasilnya.

Pembangunan pada sektor pertanian yaitu pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan lahan dan tumbuhan yang cocok pada iklim

setiap daerah. Pembangunan ini tentunya juga melihat kemampuan dari masyarakat untuk mengelolanya serta memasarkannya. Pembangunan pada sektor perdagangan adalah pembangunan yang meliputi jual beli antar masyarakat desa dengan menjual atau memasokkan barang dagangannya kepada para supplier yang nantinya akan dimabil oleh pedagang kecil atau pasar. Sedangkan pembangunan pada sektor infrastruktur adalah pembangunan yang dikelola oleh masyarakat serta pemerintah daerah untuk membuat daerah tersebut maju dengan infrastrukturnya. Pembangunan ini biasanya dijadikan tempat wisata ketika infrastruktur di daerah tersebut sudah berhasil atau sudah diresmikan. Pembangunan pada bidang ini mengandalkan keunikan serta destinasi yang ada di wilayahnya.

Desa wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu desa yang mengembangkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan. Pembangunan di desa tersebut melibatkan masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaannya, dimana masyarakat sebagai pengelola lahan dan pemerintah desa sebagai penyedia lahan. Desa Wates memiliki sebuah produk unggulan dari pembangunan sektor pertanian ini yaitu padi organik. Dimana untuk membangun sebuah produk tersebut tentunya tidak lepas dari peran kepala desa dan masyarakat, peran dari kepala desa yaitu menyediakan lahan atau tempat untuk mengembangkan pembangunan pada sektor pertanian ini dengan sistem sewa tanah sedangkan peran dari masyarakat yaitu mengelola serta memasarkan padi organik tersebut dari satu tempat ke tempat yang lainnya, produk tersebut dikelola oleh kelompok tani. Dengan adanya pembangunan di sektor pertanian ini Desa Wates mendapat kunjungan dari Bupati Ponorogo Bapak Ipong Muchlissonipada tanggal 09 Oktober 2018 untuk terus mengembangkan serta mengelola kegiatan ini bersama masyarakat.

Kunjungan Bupati Ipong Muchlissoni di Desa Wates Kecamatan Jenangan disambut warganya dengan antusias serta unjuk gigi, dengan memamerkan berbagai produk unggulan yang ada di desanya berupa padi organik yang pengelolaannya diserahkan kepada BUMDes Taman Dewa, pihaknya terus berkomitmen untuk memasarkan produk beras organik dengan merek “Dewa”.

“Kami memiliki lahan seluas 1 hektar sebagai upaya untuk terus menanam padi organik, saat ini kami pasarkan dengan harga Rp.13.000/kg atau Rp.65.000/5kg.” jelas Bapak Kabain selaku Kepala Desa Wates. (diakses dari <https://www.suaramedianasional.co.id/wates-prioritaskan-beras-organik-dewa.html> pada tanggal 09/10/2018)

Peran dari kepala desa untuk pengelolaan padi organik ini sebagai penyedia fasilitas berupa lahan pertanian milik pemerintah desa /bengkong dengan sistem sewa tanah. Kelompok tani dalam mengelola padi organik ini nampaknya kurang berhasil dalam pemasarannya karena terkendala hasil panen yang kalah saing dengan jenis padi biasa. Kepala desa beserta aparatnya dalam hal ini nampaknya juga kurang dalam keikutsertaan pemasaran padi organik kepada masyarakat setempat maupun diluar desa. Hal ini yang menyebabkan penghambat dalam kemajuan serta pengelolaan pembangunan pada sektor pertanian yaitu padi organik di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut. “Bagaimana peran kepala desa dalam pembangunan pada sektor pertanian di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini untuk mengetahui peran kepala desa dalam pembangunan pada sektor pertanian di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat teoritis dan praktis dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana peran kepala desa terhadap pembangunan di sektor pertanian padi organik Desa Wates Jenangan Ponorogo

2. Bagi Desa

Untuk meningkatkan produktivitas serta mengelola kerjasama dengan pihak luar agar produk unggulan akan berkembang.

3. Bagi Institusi

Untuk dapat bekerjasama dan memberikan perhatian kepada setiap produk unggulan yang ada di desa



